

## Pendapatan Asli Daerah- Dan Bapenda Optimis Tuntaskan Target 2024, Capaian PAD Kota Palopo Sudah 90,30 Persen



Sumber gambar:

<https://koranseruya.com/bapenda-optimis-tuntaskan-target-2024-capaian-pad-kota-palopo-sudah-9030-persen.html>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga bulan November 2024 telah mencapai 90,30 persen atau setara dengan Rp 44.424.113.398,- dari total target sebesar Rp 49.197.000.000,-.

Capaian ini mencakup 11 jenis pajak utama, di antaranya: Pajak Restoran yang sudah mencapai 91,09 persen.  
Pajak Penerangan Jalan mencapai 93,74 persen.

Kemudian Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bahkan melampaui target, mencapai 105,36 persen.

Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan, Rahmatiah menyampaikan bahwa capaian PAD ini menunjukkan selisih kurang sebesar Rp 4,7 miliar dari target yang ditetapkan.

“Hal ini tentu berkat kerja keras dan koordinasi yang efektif. Bapenda Palopo berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi,” katanya.

Kepala Bapenda Palopo, Andi Agus Mandasini, mengungkapkan bahwa capaian PAD tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia optimis bahwa target PAD tahun 2024 dapat dicapai sepenuhnya sebelum akhir tahun.

“Salah satu faktor utama pencapaian ini adalah strategi pemantauan yang lebih ketat serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data pajak dan retribusi,” jelas Agus.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk edukasi kepada masyarakat, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran pajak.

Untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif, Bapenda Palopo telah meluncurkan berbagai inovasi berbasis digital.

Salah satunya adalah aplikasi pembayaran pajak online yang memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor.

“Inovasi ini tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga memperkecil potensi kebocoran pendapatan daerah,” kata Agus.

Meski capaian sudah mendekati target, Bapenda Palopo tetap bekerja keras untuk mencapai 100 persen target PAD pada akhir tahun 2024.

Agus menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya keberhasilan pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Kota Palopo.

“Semoga upaya ini terus mendorong peningkatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://koranseruya.com/bapenda-optimis-tuntaskan-target-2024-capaian-pad-kota-palopo-sudah-9030-persen.html>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.